Pembangunan Kawasan Khusus Nusantara Dalam Penanggulangan Terorisme

Agus Purwanto¹, Heru Nurasa², Yanyan M. Yani³, Ida Widianingsih⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi : ida.widianingsih@unpad.ac.id

ABSTRAK

Problem mantan narapidana terorisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, adanya stigma negative dari masyarakat dan minimnya modal dan tidak memiliki lahan. Hal ini kalua tidak mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat serta keluarga, dapat dimanfaatkan kembali oleh kelompok-kelompok radikal untuk direkrut kembali. Pembangunan Kawasan Khusus Nusantara dalam program Penanggulangan Terorisme, bertujuan untuk memberikan saran pembelajaran dan mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana terorisme dan masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya mampu meminimalisir gerakan radikal terorisme. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Responden penelitian, yaitu mantan narapidana, keluarga, jaringan, masyarakat sekitarnya dan penyintas, pemda, akademisi, kementerian/lembaga, dan swasta. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, studi pustaka, studi dokumentasi dan FDG. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa para mantan narapidana, setelah kembali ke masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan dan sangsi sosial. Disarankan perlunya pembangunan kawasan khusus nusantara untuk para mantan narapidana, keluarga, jaringannya, masyarakat sekitarnya dan penyintas guna menghasilkan nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga meminimalkan paham radikal terorisme.

Kata Kunci: penanggulangan terorisme, kawasan khusus nusantara.

PENDAHULUAN

Aksi kejahatan tindak pidana terorisme sudah banyak terjadi di Indonesia dan kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun dan mengakibatkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Aparat kepolisian pun sudah melakukan penangkapan terduga pelaku terorisme dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Asharul Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), Jamaah Islamiah (JI) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penangkap ini juga tersebar di berbagai kota, seperti di Jakarta, Bekasi, Bogor, Sragen, Kudus, Jepara, Semarang dan Lampung dan sebagainya. Tidak luput juga yang ikut pelatihan didalam negeri selanjutnya berangkat ke Suriah sebagai *foreign terrorist fighter* (FTF)

Melihat uraian diatas, bahwa penting Indonesia untuk meningkatkan keamanan dalam negeri yang serius, karena kejahatan terorisme telah mengancam bangsa dan negara Indonesia, bahkan pelakunya sudah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian kejahatan terorisme harus dihadapi dengan cara lebih serius guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pencegahan penanggulangan terorisme tidak multak oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), namun menjadi tanggung jawab bersama, semua komponen negara. Program penanggulangan terorisme sudah melibatkan kementerian/lembaga melalui 3 pendekatan yaitu intelijen/ penggalangan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi dengan fokus pada pencegahan.

Sasaran dari pencegahan ini adalah mantan nara pidana terorisme (napiter), keluarga, jaringan, masyarakat sekitarnya dan penyintas. Khususnya napiter setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk kembali ke masyarakat dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Hal ini yang sering menjadi permasalahan para napiter, karena status sebagai mantan napiter sering dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga napiter sendiri bingung mau bagaimana, hal ini yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk direkrut kembali menjadi bagian dari kelompok radikal terorisme.

Karena mereka di biayain dan diberi modal usaha sebagai pekerjaannya. Hal inilah yang tidak boleh terjadi mantan napiter kembali ke kelompok radikal terorisme karena mereka akan melakukan kembali aksi-aksi terorisme.

Dengan kesulitan para mantan napiter tersebut, maka perlukan pemerintah memberikan wadah dengan pembangunan kawasan khusus nusantara, media ini sebagai sarana pembelajaran dalam kehidupan kebersamaan sesuai talenta yang dimiliki mantan napiter untuk dapat menghasilkan nilai ekonomi untuk menompang kehidupan yang normal bersama keluarga dan masyarakat sekitarnya dan kawasan khusus ini sebagai objek wisata daerah. Kawasan ini sebagai area usaha, pembinaan wawasan kebangsaan dan agama yang benar, kesenian sesuai kearifan lokal miliki akan dapat menurunkan tingkat radikalnya dan memiliki sikap patriotisme kepada negara yang besar.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian diskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian pembangunan kawasan khusus nusantara dalam program penanggulangan terorisme, dikatakan khusus ini dikarenakan pelaku kegiatan ini adalah mantan napiter, keluarga, jaringannya dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan ini.

Informan didapat secara purposive, yaitu dari aparat keamanan wilayah dari kepolisian maupun TNI, pemerintah daerah, baik kesbangpol maupun para kedinasan terkait, intelijen daerah, pondok pesantren untuk memberikan informasi berapa banyak jaringan terorisme yang ada diwilayahnya, mantan napiter dan keluarganya untuk diidentifikasi dan kelompokan sesuai ketrampilan yang dimiliki. Kemudian para kemangku kepentingan, seperti kepala daerah, kementerian/lembaga yang terlibat dalam sinergitas antarkementerian/lembaga, para akademisi, tokoh masyarakat dan adat, untuk membuat pembangunan kawasan khusus ini, dari penyiapan lahan, penentuan pelaku usaha,

bagaimana permodalan, pengawasan, pembinaan dan sebagainya

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian, antar lain sebagai berikut: studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini; studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, Selain itu dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Sebagai alat pengumpulan data ini digunakan pedoman wawancara dan bahan dokumen lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unit dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi /keragaman (Bungi, 2003). Data yang terhimpun melalui penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskripsi. Menurut Sugiyono (2010), analisis deskripsi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Dalam kerangka ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Karena analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL PENELITIAN

Rencana pembangunan kawasan khusus nusantara ada di lokasi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, Namun saat ini yang sudah berjalan ada di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Malang, Jawa Timur serta Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam disain pembangunan kawasan khusus nusantara, melalui beberapa tahap, yaitu

a. Identifikasi sasaran

Dalam tahap ini nantinya akan diperoleh data tentang pelaku usaha, baik jumlah mantan nara pidana terorisme dan keluarganya, jumlah jaringan dan masyarakat sekitarnya. Data tersebut dikelompokkan sesuai ketrampilan yang dimiliki sesuai kebutuhan pembangunan ini

b. Model kawasan

Dari data identifikasi tersebut, bisa ditentukan bentuk kawasan khusus tersebut bentuknya apa, bisa pertanian, perternakan, perikanan maupun ukm-ukm lainnya.

c. Penyiapan lahan

Pembicaraan lahan akan diskusikan antara pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah dengan kementerian/lembaga, bagaimana penyiapan lahan, apa dibeli oleh pemerintah daerah atau pinjam pakai milik negara, dalam hal ini perhutanan atau perkebunan. Lahan ini akan dikaji oleh akademisi untuk melihat tingkat efisien dan efektifitas pemanfaatan lahan terhadap model kawasan yang akan digunakan.

d. Berkelanjutan

Mulai dari pelatihan, pelaksanaan dan penjualan yang terhimpun melalui koperasi, senantiasa dapat pendampingan dan pengawasan. Pendampingan berguna melihat apa yang dilakukan apa sudah tepat dan benar, tercukupi kebutuhan sebelum masa panen setelah panen, saran prasarana yang dibutuhkan dalam usahanya dan pemasaran hasil produksinya. Hal ini agar memonitor dan dievaluasi dengan benar supaya dapat berkelanjutan dari waktu ke waktu bukan hanya instan.

e. Pengawasan

Dalam pengawasan sangat diperlukan, bagaimana kehidupan para pelaku usaha tersebut, dari kehidupan keseharian, baik aktifitas usahanya, keagamanya, wawasan kebangsaannya. Pengawasan dan pembinaan menjadi tanggungjawab aparat wilayah, baik babinsa, babinkantimas, kesbangpol.

Peran dari kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan ini yaitu memberikan rencana aksi sesuai dengan tugas fungsi kementerian tersebut, misalnya kementerian pertanian, akan memberikan pelatihan, bibit dan pendampingan oleh dinas pertanian daerah dalam bercocok tanak yang benar dan tepat sampai menghasilkan apa yang sudah dilakukan. Saat ini

sudah ada 42 meneterian/lembaga yang sudah berpartisipasi dalam penanggulangan terorisme dalam kegiatan sinergisitas antarkementerian/lembaga, khususnya pembangunan kawasan khusus nusantara.

Dengan kolaborasi masyarakat terpapar, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, akademisi, swasta dan media, pembangunan kawasan khusus nusantara program penanggulangan terorisme secara bertahap dan berkelanjutan dapat dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan mendorong perekonomian wilayah serta meminimalkan paham radikal terorisme. Selain mendapatkan tambahan pendapatan juga menjadikan area tersebut sebagai wahana objek wisata.

KESIMPULAN

Pembangunan kawasan khusus nusantara program penanggulangan terorisme, merupakan model deradikalisasi yang digagas oleh BNPT, didukung oleh semua komponen masyarakat untuk meminimalis paham radikal terorisme di Indonesia. Untuk dapatnya konsep pembangunan kawasan khusus ini, diperlukan regulasi yang tepat dan benar, dikarenakan melibatkan anggaran kementerian/lembaga guna pertanggungjawaban di masing-masing kementerian/lembaga. Pemerintah daerah yang memiliki masyarakat dan wilayah agar dengan cermat melaksanakan pengawasan yang ketat supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan memiliki kegunaan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Nasir, 2009, *Memberantas Terorisme, memburu Nurdin M. Top*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Emily R. Lai, *Collaborations: A Literature Review*, 2011, Pearson Reaearch Report.